



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANITA ISKANDAR
2. Jabatan : DIREKTUR KERJA SAMA INTERNASIONAL KEPABEANAN DAN CUKAI
3. NHK : 160342

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.405.013.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 425 m2/92 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 794.963.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/105 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 610.050.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 96.550.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 79.500.000
2. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 17.050.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 621.796.628

D. SURAT BERTHARGA Rp. 510.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 188.172.212

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.821.531.840

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.821.531.840

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.